

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Gangguan penglihatan merupakan salah satu permasalahan utama yang dimiliki oleh masyarakat internasional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan merumuskan suatu resolusi yang berjudul “*Integrated People-Centred Eye Care, including Preventable Vision Impairment and Blindness*” atau disebut juga Resolusi “*Eye Health*”. Resolusi ini diajukan oleh Indonesia kepada WHO, yakni badan kesehatan internasional yang berwenang dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Proses perumusan berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2020 melalui berbagai tahapan.

Dari hasil penelitian, tahapan ini dimulai dari membangun suatu pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata. Kemudian Indonesia berkesempatan untuk menungakan ide-ide terkait resolusi pada *Side Event* WHA. Hasil dari *Side Event* tersebut melahirkan kesimpulan-kesimpulan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengajukan sebuah resolusi pada tingkatan global. Indonesia harus melakukan research terlebih dahulu terkait pengajuan resolusi tersebut. Setelah itu, Indonesia membuat konsep-konsep mengenai pentingnya kesehatan mata yang nantinya akan ditawarkan kepada negara-negara lain dengan tujuan mendukung resolusi “*Eye Health*”. Indonesia bersama dengan Australia melakukan *concept planning* yaitu penyusunan draf resolusi. Perencanaan dilakukan sesuai dengan *World Health Procedure Assembly*, hingga akhirnya agenda tersebut berhasil diterima untuk masuk kedalam pembahasan sidang WHA. Kemudian, Indonesia juga meminta persetujuan *executive board* WHO agar dapat memasukan resolusi “*Eye Health*” kedalam agenda pembahasan sidang WHA dan dapat menjalankan keputusan tersebut serta mendapatkan berbagai masukan-masukan ahli.

Pada bulan November 2019 diadakan agenda sementara untuk membahas resolusi “*Eye Health*”, yang kemudian dibahas lebih lanjut pada sidang *executive*

Dhia Arnaz, 2022

Diplomasi Indonesia Kepada WHO Terkait Penanggulangan Gangguan Penglihatan 2016-2020

81

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

board. Setelah itu, Indonesia melakukan pendekatan dan diskusi dengan beberapa negara dan informan untuk mendapatkan partisipan dalam pembahasan, konsultasi kepada informan yaitu para ahli di bidang kesehatan dan juga untuk mendapatkan *co-sponsor* acara. Pada akhirnya Indonesia mendapatkan 47 negara yang menjadi negara *co-sponsor*. Kemudian pada tanggal 3 Februari sampai dengan 8 Februari 2020 dilakukan sidang executive board, dengan hasil resolusi “*Eye Health*” disetujui untuk dibahas pada agenda pembahasan sidang WHA. Agenda pembahasan sidang WHA berlangsung selama 5 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Selama dilakukannya sidang tersebut negara-negara lain menyetujui resolusi tersebut dan tidak ada lagi masukan terkait resolusi “*Eye Health*”.

Menurut analisa saya, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada WHO terdapat hambatan seperti Indonesia yang membutuhkan bantuan dari negara-negara lain berupa persetujuan dan dukungan. Dengan adanya perbedaan waktu dan tempat di setiap negara maka hal ini membuat sulitnya komunikasi antar negara. sehingga membutuhkan waktunya cukup lama. Negara-negara lain menyetujui resolusi ini dikarenakan apabila dilihat dari kondisi negara-negara lain masih banyak negara-negara yang masyarakatnya banyak mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan bantuan untuk mengatasi permasalahan ini. Masih banyak kesenjangan yang dirasakan oleh negara-negara berkembang seperti fasilitas kesehatan yang kurang memadai, tenaga medis yang masih kurang, mahalnya biaya pengobatan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, resolusi ini seharusnya dapat membantu negara-negara didunia khususnya negara-negara berkembang agar masyarakat didunia dapat merasakan fasilitas kesehatan mata yang baik dan mudah. Proses pengajuan resolusi “*Eye Health*” ini berlangsung selama 5 tahun, dimana dalam proses pengajuan resolusi ini dikatakan berlangsung dengan baik dan berjalan secara normal. Praktek-praktek diplomasi yang dilakukan juga sesuai dengan tatanan-tatanan yang berlaku dalam WHO. Negosiasi dan diplomasi dijalankan sebagaimana mestinya. Selama proses pengajuan resolusi “*eye health*” dengan judul “*Integrated People-Centred Eye Care, including Preventable Vision Impairment and Blindness*” negara-negara bekerjasama dengan baik demi

tercapainya kurangnya tingkat gangguan penglihatan didunia sehingga masyarakat didunia sehat dan dapat hidup dengan sejahtera.

5.2 Saran

Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada WHO terkait resolusi “*Eye Health*” berjalan selama 5 tahun. Namun alangkah lebih baik apabila dalam melakukan perumusan berjalan lebih cepat, kemudian untuk dapat mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan kesehatan mata yang ada di Indonesia, kiranya lebih baik lagi jika Indonesia merumuskan dan menerapkan berbagai resolusi dalam bidang terkait secara rutin dan berkala. Dan untuk mempersingkat perumusan, para *stakeholder* yang terlibat dapat lebih mempererat dan meningkatkan intensitas komunikasi untuk memudahkan proses negosiasi dan persetujuan kebijakan. Selain itu, pemerintah dan para sponsor juga sudah seharusnya menyediakan alokasi keuangan yang dapat menutupi seluruh rangkaian kegiatan. Kemudian saya juga memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti bagaimana implementasi dari resolusi “*Eye Health*” yang disepakati oleh Indonesia dan WHO di Indonesia.